

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program - program, personel, dan kebijakan - kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan - pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander (Fahrudin 2014:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi - relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan - kemampuan mereka secara penuh, serta

untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan - kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Menurut Suharto (2014:1) kesejahteraan sosial adalah

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto di atas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Adi Fahrudin (2014:10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi - relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas, tujuan kesejahteraan sosial berfokus pada pola pencapaian kehidupan pokok manusia yang mencakup kebutuhan ekonomi fisik, ekonomi, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupannya.

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan - tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio - ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi - konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2014: 2) fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi - kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

Berdasarkan kutipan di atas, fungsi - fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat. Fungsi - fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat itu sendiri.

2.1.4. Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan - pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Fahrudin (2014:51) pendekatan - pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya - upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.

2. Pekerjaan sosial

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

4. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang sifatnya *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakatnya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang profesional. Pekerjaan sosial sendiri memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu, kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsian sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik. Menurut Asosiasi nasional pekerjaan sosial amerika serikat (NASW) dalam Fahrudin (2014:60):

Social work is the profesional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the profesional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychoteraphy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural intitutions; and of the interaction of all these factors.

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik kerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini.

Terkait dengan kutipan di atas, pekerjaan sosial tidak lepas dari penerapan nilai, prinsip, dan tujuan yang mereka miliki. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Proses pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik.

Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti system pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya. Suharto (2014:5). Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip Fahrudin (2014:66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan - kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem - sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan - pelayanan, dan kesempatan - kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem - sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan - pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Menurut Fahrudin (2014:71) mengatakan bahwa secara tradisional pekerja sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(1) Metode Pokok: social case work, Social group work, dan Community Organization/Community Development. (2) Metode Pembantu: Social work administration, Social action, dan Social work research”.

Metode - metode tersebut digunakan berdasarkan dan kebutuhan dari klien yang ditangani oleh para pekerja sosial. Semua tergantung kepada kasus atau masalah yang ada, sehingga penanganannya perlu disesuaikan sehingga dapat bisa ditangani dengan efektif dan efisien.

2.2.1. Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan dari awal proses. Adapun peranan yang dimiliki oleh pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, mediator, broker, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan evaluator. Peranan tersebut mengawal pekerja sosial menuju peningkatan keberfungsian sosial yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh Suharto (2007:5) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya
- b. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.

- c. Meningkatkan kinerja lembaga - lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berkeprimanusiaan.
- d. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya, tidak sama dengan profesi seperti psikologi, dokter, psikiater. Contohnya, ketika mengobati seorang pasien maka psikolog hanya berfokus pada kejiwaan pasiennya saja. Namun, berbeda dengan pekerja sosial yang ketika menghadapi klien, mereka tidak hanya melihat kepada target perubahan, melainkan kepada lingkungan sosial di mana pasien berada, bagaimana orang - orang di sekelilingnya yang juga memiliki pengaruh yang besar kepada keadaan klien. Ruang pekerja sosial adalah menolong klien sebagai pelayanan sosial baik untuk individu, keluarga, kelompok, baik masyarakat yang membutuhkannya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional pekerja sosial. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (fungsi sosial) melalui serangkaian proses yang memiliki tujuan dan strategi.

Keberfungsian sosial merupakan konsep yang memiliki substansi yaitu keterkaitan, hubungan, interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat seperti sistem keagamaan, sistem pendidikan, sistem pelayanan sosial, sistem keluarga, sistem politik dan lain-lain. Contohnya adalah kemampuan individu dalam menjalankan peran sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, seorang ibu memiliki peran sebagai pendidik, pengelola keuangan, pasangan suaminya. Oleh karena itu, seorang ibu dapat meminta izin fungsi tersebut. Namun,

disetujui ibu tidak dapat melakukan peranannya karena sakit, cacat, atau halangan lain maka ia dapat disetujui tidak menggunakan sosial atau disfungsi sosial.

2.2.2. Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam penyelenggaranya meliputi fungsi - fungsinya tersendiri. Penunjang terhadap tujuannya juga yaitu Siporin dalam Sukoco (1992: 52-54) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadainya standar - standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam insutusi - institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (social order) serta struktur institusional masyarakat.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi - fungsi pekerjaan sosial yaitu berfokus pada kebutuhan - kebutuhan dasar. Standar - standar kesehatan dan kesejahteraan, status dan peranan dalam institusi sosial. Ketertiban sosial struktur institusional yang ada pada masyarakat demi tercapainya keberfungsian sosial.

2.2.3. Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Menurut Mans dalam Fahrudin (2014: 16-19), ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan

2. Komunikasi

Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.

3. Individualisasi

Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

4. Partisipasi

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

5. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri pekerja sosial.

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

2.2.4. Tahapan - tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan. Dalam pelaksanaannya tahapan - tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial. Siporin dalam Iskandar (2013:65) menyatakan terdapat 6 (enam) tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

a. Tahap engagement, intake dan contract

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak

diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan - tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan - peranan dan harapan - harapan pekerja sosial dan klien, metode - metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan - pengaturan lainnya.

b. Tahap Assessment

Assessment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor - faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi

Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

e. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

f. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referal atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor - faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga - lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Penjelasan dari enam tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan - tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan - tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

2.2.5. Peran - peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level yakni, level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode - metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *case work* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy*

(terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan).

Menurut Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2014:155) peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya. Peranan yang dilakukan oleh perkerja sosial antara lain:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*)

Pekerja sosial menghubungkan antara anak asuh dengan sistem sumber baik bantuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan

2. Peranan Sebagai (*Enabler Role*)

Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi anak asuh untuk menolong dirinya sendiri. Pada peranan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan anak asuh dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh. Anak asuh melakukan semaksimal mungkin

kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.

3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*)

Peran pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator role*) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar anak asuh dengan keluarga, konflik antar anak asuh yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.

4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*)

Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari anak asuh atau penerima pelayanan.

5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)

Peranan yang di asumsikan ketika pekerja sosial dan anak asuh atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*)

Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*guardian role*) sering kali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi anak asuh atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.

7. Peranan Sebagai Fasilitator (*Fasilitator Role*)

Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak asuh hal ini bertujuan agar anak asuh tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi anak asuh. Disamping itu peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh.

8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*)

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.

9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)

Peran ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik.

2.3. Konsep Masalah Sosial

2.3.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kondisi yang tidak sesuai

seperti yang diharapkan atau bahkan tidak sesuai dengan nilai, norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik secara fisik maupun secara non fisik. Masalah sosial menurut Weinberg (1981:4) dalam Soetomo (2010:7) bahwa masalah sosial adalah:

Situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dimana dari definisi tersebut memiliki tiga unsur penting yaitu:

1. Suatu situasi yang dinyatakan
2. Warga masyarakat yang signifikan
3. Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah.

Definisi di atas dapat dikemukakan bahwa suatu masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan selalu mendorong adanya tindakan untuk mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap keadaan tersebut, agar terciptanya suatu kondisi kehidupan yang lebih diharapkan dan kondisi yang sejahtera. Dan dari unsur di atas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai suatu masalah sosial jika gejala tersebut didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Weinberg melihat bahwa masalah sosial sebagai hasil permasalahan masyarakat. Sedangkan Kartono (1992:2) dalam Huraerah (2011:4) berpandangan bahwa yang disebut masalah sosial yaitu:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerosakan adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Definisi di atas bahwa suatu masalah sosial dianggap masalah apabila hal tersebut dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat melanggar adat-istiadat dalam warga masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dengan demikian bahwa adat istiadat dan kebudayaan tersebut memiliki nilai pengontrol terhadap tingkah laku dalam anggota masyarakat.

2.3.2. Karakteristik masalah sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomis yang salah satunya adalah kemiskinan. Dalam Huraerah (2011:83) masalah sosial memiliki 4 karakteristik, yaitu:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.
2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai dibicarakan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.3.3. Komponen Masalah Sosial

Banyak komponen agar dapat memahami arti dari masalah sosial yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Parillo yang dikutip dari Soetomo (1995:4) dalam Huraerah (2011:5) menyatakan, ada empat komponen, yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.

- b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari komponen di atas jelas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masyarakat dirasa masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian secara luas, melanggar atauran yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan masalah tersebut membutuhkan pemecahan sebagai solusinya agar terciptanya suatu kondisi yang lebih dari harapan dan kondisi yang sejahtera.

2.4. Konsep Penanggulangan Masalah Sosial

2.4.1. Pengertian Penanggulangan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi satu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki. (Hasanah & Putri, 2019)

Penanggulangan adalah merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi, maka penanggulangan dapat juga disebut suatu usaha untuk mewujudkan, membina, serta memelihara suatu permasalahan sosial agar tidak terjadi lagi. Permasalahan sosial yang besar yang harus segera diatasi.

Penanggulangan dapat didefinisikan sebagai tindakan dimana penduduk atau aparat di daerah setempat mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para aparat setempat baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Fokus utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial. Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang - kurangnya melindungi mereka dari situasi - situasi yang eksploitatif dan membahayakan. (Senja et al., 2012).

2.4.2. Tahap – Tahap Penanganan Masalah Sosial

Pada dasarnya masalah sosial fenomena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. Agar lebih berdaya guna, upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut perlu dilandasi oleh analisis untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi dan latar belakang gejala yang disebut masalah sosial tadi. dilihat dari proses untuk melakukan studi masalah sosial maupun proses untuk melakukan upaya penanganan masalah dalam soetomo (2008:28) dikenal adanya tiga tahap yaitu identifikasi, diagnosis dan treatment.

1. Tahap identifikasi

Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat, perwujudannya dapat merupakan masalah lama yang mengalami perkembangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam studi masalah sosial, terdapat beberapa kriteria yang sering digunakan untuk melakukan identifikasi awal guna mengetahui apakah dalam suatu masyarakat terkandung fenomena yang disebut masalah sosial atau tidak.

Dari beberapa kriteria yang digunakan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu ukuran objektif dan subjektif (Raab and Selznick, 1964:5). Ukuran objektif merupakan instrument untuk mengetahui keberadaan gejala masalah sosial dalam masyarakat dengan menggunakan parameter yang dianggap baku dengan memanfaatkan data yang ada termasuk angka statistik. Indikator sederhana adalah identifikasi masalah sosial dengan memanfaatkan angka statistik yang tersedia bagi daerah tertentu seperti monografi, kabupaten atau provinsi dalam angka. seperti contoh misalnya, jumlah peristiwa pencurian, jumlah anak jalanan, jumlah peristiwa pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya.

Ukuran subjektif merupakan instrument identifikasi masalah sosial berdasarkan interpretasi masyarakat. Pada umumnya interpretasi tersebut menggunakan referensi nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku. Oleh sebab itu ukuran ini menjadi bersifat relative, karena setiap masyarakat dapat memiliki nilai, norma dan standar sosial yang berbeda. Ukuran yang relative tersebut tercermin dari pengertian masalah sosial sebagaimana dikemukakan oleh Weinberg (1981:4) dalam Soetomo (2008:41) dikatanya bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai bertentangan dengan nilai oleh sejumlah warga masyarakat

yang cukup signifikan, yang mana mereka sepakat tentang dibutuhkannya suatu Tindakan untuk mengubah dan memperbaiki situasi tersebut. dalam kenyataannya bentuk pernyataan warga masyarakat tersebut tidak selalu bersifat eksplisit atau bersifat formal, dalam berbagai kesempatan bentuknya dapat berupa reaksi penolakan terhadap perilaku atau situasi tertentu, maka mengapa ukuran subjektif ini disebut relatif.

2. Tahap diagnosis

Upaya pemecahan masalah sosial agar mendapatkan hasil yang diinginkan, dibutuhkan pengenalan sifat, eklasi dan latar belakang masalah ini yang bisa disebut sebagai tahap diagnosis. Dengan demikian mendiagnosis masalah sosial pada dasarnya adalah mencari sumber kesahalan tadi. Berkaitan dengan hal ini Eitzen (1987:12) dalam soetomo (2008:43) membedakan adanya dua pendekatan yaitu *person blame approach* dan *system blame approach*.

Person blame approach sesuai namanya dalam menentukan diagnosis lebih menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Sumber masalah sosial dilihat pada factor-faktor yang melekat pada individu penyandang masalah, baik factor fisik, psikis, maupun proses sosialisasinya. Sementara itu *system blame approach* lebih memfokuskan pada sistem sebagai unit analisis untuk mencari dan menjelaskan sumber-sumber masalahnya. Pendekatan ini lebih melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan sturuktur sosial, institusi sosia, fungsi dari berbagai komponen dalam siste sosial, kemampuan sistem sosial dalam merespons perubahan sosial.

3. Tahap Treatment

Tindakan treatment atau upaya pemecahan masalah yang ideal adalah apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. Walaupun demikian, untuk penanganan masalah sosial, harapan ideal tersebut jarang atau sulit untuk dapat di wujudkan. Sebagai contoh, walaupun sejak lama sudah dilakukan usaha untuk menanganannya, masalah kriminalitas dan prostitusi sebagai bentuk masalah sosial yang tergolong tua, sampai saat ini masih ada keberadanya.

Apabila suatu bentuk masalah sosial mengalami kecenderungan meningkat dengan tajam, kemudian upaya treatment berhasil menghambat laju peningkatannya, maka berarti telah ada usaha mengurangi masalah sosial, demikian juga upaya membatasi eskalasi meluasnya lingkup masalah sosial baik pada dimensi wilayah atau strata sosial, hal ini pun sudah dapat dikategorikan sebagai upaya treatment.

Oleh sebab itu penanganan masalah sosial yang merupakan bentuk treatment perlu dilakukan secara komprehensif, tidak semata mata melakukan rehabilitasi terhadap penyandang masalah sosial, tetapi juga melakukan upaya pencegahan.

2.4.3. Pemecahan Masalah Sosial Berbasis Negara

Sebagaimana yang telah banyak disinggung mengenai masalah sosial adalah suatu kondisi yang memberikan inspirasi dan kesadaran diperlukannya suatu upaya atau proses untuk melakukan perubahan dan perbaikan kondisi tersebut, atau upaya untuk memecahkan masalahnya. Menurut Soetomo (2008: 207) Salah satu pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab untuk melakukan

perubahan dan perbaikan tersebut adalah negara. Sehubungan dengan hal ini, kebijakan sosial dapat dilihat sebagai salah satu upaya yang direncanakan untuk memecahkan masalah sosial tersebut, atau setidaknya merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi yang tidak diharapkan.

1. Kebijakan sosial

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, kebijakan sosial kadang dinyatakan sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial. Kebijakan sosial tidak hanya memberikan fokus perhatian terhadap masalahnya itu sendiri, akan tetapi juga merancang suatu perubahan atau mengelola struktur sosial maupun jaringan relasi sosial. Fokus perhatian pemecahan masalah sosial yang dilakukan dengan memberikan bantuan dan pelayanan kepada kelompok tertentu sebetulnya hanya merupakan tahap awal, yang pada umumnya ditujukan kepada kelompok sasaran warga masyarakat yang jadi penyandang masalah. Langkah tersebut seharusnya dilanjutkan dengan upaya yang lebih institusional.

Untuk melihat efektivitas kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, setidaknya pada level konsep perlu dilakukan elaborasi berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Hill (1997:1) dalam Soetomo (2008:213) yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan

2. Perencanaan Sosial

Perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang amat kompleks berupa perumusan tujuan kebijakan dan sasaran secara luas. Tujuan

kebijakan ini terjemahkan dalam bentuk rencana yang lebih rinci. Pada dasarnya negara mempunyai komitmen untuk mensejahterakan rakyatnya, disamping itu negara juga merasa memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, agar dapat memberikan dampak nyata baik bagi upaya pemecahan masalah sosial maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan tersebut dituangkan ke dalam berbagai program. Perumusan dan pelaksanaan program - program tersebut dituntun oleh adanya perencanaan, dalam hal ini adalah perencanaan sosial.

2.4.4. Pemecahan Masalah Berbasis Masyarakat

Sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya, sebetulnya masyarakat sendiri paling tidak menghendaki adanya masalah sosial. Oleh sebab itu, keberdaanya akan mengundang respon yang merupakan reaksi masyarakat terhadap kondisi tersebut. Respon dari masyarakat terhadap masalah sosial dapat berupa Tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam bentuk Tindakan rehabilitatif, atau bahkan mengantisipasi agar kondisi yang tidak diharapkan tersebut tidak terjadi lagi.

1. Mengembangkan Sistem Sosial yang Responsif

Menurut pemikiran ini, masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan, penyembuhan dan penanganan masalah sosial secara mandiri melalui bekerjanya mekanisme sistem sosialnya. Dalam hal ini, kondisi masalah sosial tersebut dianggap sebagai produk dari proses yang terjadi dalam sistem sosial yang melibatkan berbagai komponen.

2. Pemanfaatan Modal Sosial

Kewenangan masyarakat untuk melakukan upaya penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Dari berbagai pengamatan, masyarakat telah banyak terlibat dalam penanganan masalah sosial. Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar sosial yang berlangsung dalam dinamika interaksi sosial dan relasi sosialnya. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal tersebut karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal fisik dan finansial dapat digunakan sebagai energi penggerak Tindakan Bersama termasuk dalam penanganan masalah sosial.

3. Pemanfaatan Institusi Sosial

Soetomo (2008:276) yang dikutip dari Hill (1966:129) mendeskripsikan lebih rinci tentang berbagai pihak yang terlibat dalam menjalankan peranan dalam pelayanan dan perlindungan sosial guna memberikan kontribusi bagi pemenuhan kesejahteraan sosial. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Asosiasi sukarela yang dapat meliputi kelompok swadaya, Lembaga sukarela independent, Lembaga sukarela kuasi pemerintah dan Lembaga non profit pemerintah
2. Lingkungan tetangga dan rumah tangga yang berasal dari keluarga ekstended dan solidaritas bertetangga
3. Pasar, berupa usaha bisnis yang bersifat privat
4. Negara, berupa pelayanan yang diselenggarakan oleh negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebetulnya dalam realitas kehidupan di Indonesia, sudah cukup banyak dijumpai berbagai usaha kesejahteraan sosial yang

bukan saja diselenggarakan oleh negara melainkan juga oleh masyarakat dan sector swasta.

1. Organisasi masyarakat

Secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga: institusi masyarakat lokal, organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan Lembaga swadaya masyarakat.

2. Organisasi Swasta

Sektor swasta sesuai sifatnya, pada umumnya adalah bidang usaha yang sangat memperhitungkan profit, dengan demikian apabila dikaitkan dengan usaha kesejahteraan sosial maka juga ditemukan organisasi swasta yang melakukan kegiatan atau usaha pelayanan sosial dalam orientasi profit. sebagai contoh dapat dikemukakan bentuk perusahaan asuransi baik yang memberikan jaminan hari tua, Pendidikan anak, maupun jaminan kecelakaan dan musibah lainnya.

Seperti yang sudah banyak kita bahas, yaitu masalah sosial merupakan kondisi yang tidakdiharpakan keberadanya, dan merupakan suatu kondisi yang harus di cegah, diperbaiki keadaannya, maka salah satu masalah sosial yang harus kita tinjau ialah masalah anak jalanan.

2.5. Konsep Anak Jalanan

2.5.1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang

belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

2.5.2. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Kementerian Sosial RI (2001:20) anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak-anak yang disebut anak jalanan yaitu anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan kegiatan tidak menentu atau minimal 4 (empat) jam/hari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu. (M. Ramadhani, Sarbaini, 2016)

Aktivitas yang dilakukan seperti sebagai pedagang asongan, meminta-minta, bermain, mengamen dan lain-lain dimana kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya atau mengganggu ketertiban umum. Banyak yang melatar belakangi atau alasan mereka berada di jalanan yaitu seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor keluarga faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor hukum.

2.5.3. Tinjauan pengelompokan Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama menurut Depdiknas (2000) yang dikutip oleh (Amin et al., 2012) yaitu :

1. *Children of the street*

Children of the street Anak yang hidup dan tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan. Anak yang hidup dan tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun dengan keluarganya.

2. *Children on jembatan.*

Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan. kereta api, emperan toko dan kolong jembatan

3. *Children on the street*

Children on the street Anak yang bekerja di jalanan, umumnya mereka adalah anak putus anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya, umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara berkala.

2.5.4. Faktor Penyebab Anak berada di jalanan

Latar belakang dari keluarga yang tidak mampu secara finansial serta tingkat pendidikan orang tua yang rendah, adanya salah asuh di dalam keluarga (komunikasi orang tua dan anak buruk, terjadinya konflik di dalam keluarga, kurangnya pendidikan dini bagi anak) yang diberikan orang tua terhadap anak-anak. Adapun memang sudah menjadi kebiasaan anak bermain di jalan yang sebelumnya bisa dipengaruhi oleh pergaulan yang salah. (Hasanah & Putri, 2019b).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, faktor tersebut menurut (Huraerah,2003:121- 139) adalah:

1. Kemiskinan

Kemiskinan selalu diasosiasikan dengan munculnya berbagai gejala sosial. Keluarga yang miskin akan mengerahkan semua sumber daya manusianya untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, selain orang tua yang bekerja, anak - anak sudah dituntut bekerja.

2. Partisipasi Sekolah

Faktor makro lainnya yang sering dihubungkan dengan anak-anak yang menghabiskan waktu luangnya di jalanan adalah partisipasi sekolah. Kita dapat berasumsi bahwa jika anak - anak itu bersekolah, maka sebagian waktunya tidak akan berada di jalanan.

3. Disfungsi Keluarga

Penelitian yang khusus mengacu pada anak-anak yang dikategorikan sebagai of the street oleh UNICEF, menunjukkan bahwa motivasi mereka di jalanan bukanlah sekedar ekonomi. Kekerasan keluarga dan keretakan keluarga

merupakan tema sentral dalam wawancara dengan mereka. Bagi anak-anak ini, kehidupan di jalanan yang keras lebih memberikan alternatif kekerasan jika dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh kekerasan. (Amin Amalia Mellisa, Krisnani Hetty, 2013)

Sementara itu menurut Roux & Smith (1998) menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam keluarga (seperti hubungan orang tua dan anak) merupakan alasan utama anak meninggalkan rumah pergi ke jalan. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak pergi ke jalan. Faktor-faktor lainnya seringkali merupakan turunan akibat kondisi kemiskinan atau ada relasi kuat yang saling mempengaruhi antar faktor-faktor tersebut, yaitu: kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri, dan pengaruh teman. Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak memang dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat. Namun, pada lapisan masyarakat bawah/miskin, kemungkinan terjadinya kekerasan lebih besar dengan tipe kekerasan yang lebih beragam. (Senja et al., 2012).

2.5.5. Dampak menjadi Anak Jalanan

Hidup dan berada di jalanan bukanlah tempat yang layak untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal karena resiko eksploitasi dan ancaman kekerasan yang bisa kapan saja dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut. Resiko menjadi anak jalanan antara lain:

(1) korban operasi tertib sosial.

- (2) korban tindak kekerasan orang dewasa.
- (3) kehilangan pengasuhan.
- (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular.
- (5) kehilangan kesempatan Pendidikan.
- (6) konflik dengan hukum; dll. Resiko - resiko tersebut akan terus melekat pada diri anak, meskipun mereka tidak meneruskan keberadaannya di jalanan. (Senja et al., 2012)

Pada periode pasca jalanan, anak menjadi tidak memiliki keterampilan di sektor lain (*non-jalanan*), tidak memiliki identitas diri yang sempurna, internalisasi perilaku/subkultur jalanan, *traumatized* dan *stigmatized*, serta reproduksi kekerasan Abu Huraerah (2012:89).

2.6. Konsep Perlindungan Anak

2.6.1. Perlindungan Anak

Mengacu pada UU nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai perlindungan anak dibagi dalam dua pengertian:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan perlindungan ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, bidang lainnya. (Rosidawati Imas, 2011)

Perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) tertulis dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai “Hak Anak”, tertulis dalam Bagian Kesepuluh mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, diantaranya:

1. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 UU No. 39 Tahun 1999).
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999).
3. Lebih tegas lagi dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya. (Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999).

2.6.2. Perlindungan Anak Jalanan

2.6.2.1. Tinjauan perlindungan anak jalanan

Intruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan program yang berkeadilan, ditetapkan sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

sebagai program prioritas nasional, yang didalamnya termasuk Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai wadah yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Dalam menangani keberadaan anak jalanan, salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menganggap perlu adanya suatu pelayanan bagi anak jalanan. (Amin Amalia Mellisa, Krisnani Hetty, 2013)

Penanggulangan anak jalanan bisa dilakukan apabila telah melalui tahap pengkajian secara mendalam terhadap kebutuhan dan potensi anak jalanan serta faktor-faktor yang melatar belakangi anak turun ke jalan. Tahap awal dalam pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Rumah Singgah adalah melakukan identifikasi agar dapat diklasifikasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya dapat diketahui adanya potensi tertentu yang melekat pada diri anak jalanan. Potensi ini menurut Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) dapat dilihat dari dua sisi yaitu potensi yang melekat pada diri anak jalanan sebagai individu dan sebagai suatu kelompok dari warga masyarakat dan potensi yang terdapat di lingkungan sosialnya baik keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Potensi pada diri anak jalanan, misalnya kecerdasan intelektual atau intellectual quotient (IQ) yang tinggi bisa diberdayakan melalui pendidikan, diberi beasiswa dan sarana pendukung lainnya dengan harapan anak jalanan bisa kembali ke sekolah, Pemberdayaan tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan awal saja, namun semua bentuk bantuan baik berupa pendidikan atau wirausaha harus

dilanjutkan pada tahap pengembangan dan pemberdayaan lanjutan hingga anak jalanan menjadi mandiri.

2.6.2.2. Model kebijakan penanganan anak jalanan

Haryono (2012) mengidentifikasikan empat model kebijakan penanganan anak jalanan yaitu:

1. *Street- centered intervention*
2. Kebijakan ini memfokuskan penanganan pada anak jalanan di tempat mereka hidup sehari-hari yaitu jalanan.
3. *Family-centered intervention*
4. Fokus penanganan model ini adalah memberdayakan keluarga untuk mencegah anak-anak menjadi hidup di jalan.
5. *Institutional-centered intervention*
6. upaya model ini berpusat pada lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (rumah singgah), (Hasanah & Putri, 2019b)

2.7. Tinjauan tentang Rumah Singgah

2.7.1. Pengertian Rumah Singgah

Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial sebagaimana dikutip oleh Krismiyarsi (2004) yang di kutip oleh (Anandar & Wibowo, 2015) mendefinisikan rumah singgah sebagai berikut:

1. Anak jalanan boleh tinggal sementara untuk tujuan perlindungan, misalnya: karena tidak punya rumah, ancaman di jalan, ancaman/kekerasan dari orang tua dan lain-lain. Biasanya hal ini dihadapi anak yang hidup di jalanan dan tidak mempunyai tempat tinggal.
2. Pada saat tinggal sementara mereka memperoleh intervensi yang intensif dari pekerja sosial sehingga tidak tergantung terus kepada rumah singgah.
3. Anak jalanan datang sewaktu-waktu untuk bercakap-cakap, istirahat, bermain, mengikuti kegiatan dan lain- lain
4. Rumah singgah tidak memperkenankan anak jalanan untuk tinggal selamanya.
5. Anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua atau saudaranya atau sudah mempunyai tempat tinggal tetap sendirian maupun berkelompok tidak diperkenankan menetap di rumah singgah, kecuali ada beberapa situasi yang bersifat darurat.
6. Anak jalanan yang sudah mempunyai tempat tinggal tetap merupakan kondisi melalui proses informal dalam resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, diharapkan mampu mencapai tujuan penyelenggaraan rumah singgah.

Secara harfiah Rumah Singgah berarti suatu tempat berhenti sebentar ketika di perjalanan untuk mampir atau istirahat, tetapi mencakup berbagai tempat kegiatan dan dimanfaatkan sebagai model sarana pembinaan anak jalanan. Tujuan umum Rumah Singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2.7.2. Tujuan Rumah Singgah

Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat
2. Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.

2.7.3. Fungsi Rumah Singgah

Sementara itu fungsi dari rumah singgah adalah sebagai berikut:

1. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan
2. Perantara antara anak jalanan dengan orang tua
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan
4. Pusat informasi tentang anak jalanan
5. Jalur masuk pelayanan sosial
6. Tempat pengenalan nilai dan norma sosial pada anak jalanan. (Yogyakarta, 2009)

